































keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.<sup>29</sup>

Namun, pemerintah tidak begitu juga menolak mentah-mentah untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di luar ketentuan usia tersebut. Seorang calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk bisa melangsungkan pernikahan yang sah menurut undang-undang. Setelah diperiksa dalam persidangan dan diyakini terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama akan memberikan suatu penetapan untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>30</sup>

Dalam mempertimbangkannya, hakim memutuskan memberikan dispensasi berdasarkan hukum Islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Dan bahaya harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap manusia tidak diizinkan mengadakan suatu yang membahayakan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pada prinsipnya, kemaslahatan harus dihilangkan. Dalam menghilangkan kemaslahatan tersebut, tidak boleh sampai ada kemaslahatan lain yang muncul. Namun, jika kemaslahatan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemaslahatan yang lain, maka harus memilih madharat

---

<sup>29</sup>Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/ 1974 dengan Multiperspektif", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2015), 437.

<sup>30</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 183.













